

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Struktural Fungsional

Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional tokoh Talcott Parson. Struktural fungsional menurut Parson masyarakat diumpamakan sebagai organ tubuh manusia. Sebagaimana tubuh manusia yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya seperti halnya masyarakat, menurut Parson dalam suatu masyarakat juga pasti terdapat berbagai kelembagaan yang saling berkaitan. Lembaga yang saling berkaitan dalam masyarakat terwujud dalam norma-norma, budaya, adat kebiasaan bersama yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menjelaskan bahwa terdapat keteraturan sosial dalam masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain, sebagaimana makna struktural fungsional yaitu struktur dapat dikatakan berfungsi jika saling berhubungan satu dengan lainnya.³¹

Teori struktural fungsional ini memang tidak secara langsung menyinggung persoalan perempuan. Tetapi, penganut aliran ini berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri antar bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik, sampai keluarga) dan masing-masing bagian selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan, sehingga dapat menjelaskan kaum perempuan. Teori ini berkembang untuk menganalisis tentang struktur sosial yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan meskipun dengan fungsi yang berbeda.³² Oleh karena itu, konsep gender

³¹ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), 97-98

³² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pegetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2011), 22

menurut teori struktural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan secara dikotomi agar tercipta keharmonisan.

Teori ini membenarkan bahwa adanya ragam fungsi dalam lingkungan masyarakat. Ragam fungsi pada struktur masyarakat ditetapkan sesuai dengan posisi seseorang.³³ Contohnya, di setiap organisasi sosial akan ada satu anggota yang layak dijadikan ketua, sekretaris, bendahara, maupun anggota. Perbedaan fungsi bertujuan agar keinginan dalam organisasi dapat dicapai. Struktur fungsi dalam organisasi tidak terlepas dari cengkaman budaya, norma dan nilai yang mendasari masyarakat. Parson dan Bless menilai bahwa klasifikasi kerja yang sepadan dalam hubungan rumah tangga mampu menciptakan keharmonisan, namun bila terjadi penyelewengan maka keutuhan rumah tangga akan mengalami keretakan.³⁴

Pendekatan struktural fungsional memandang gender sebagai suatu yang bermanfaat. Bagi pendekatan ini, pemberian label maskulin dan feminisme serta pengasosiasian sifat-sifat tertentu pada laki-laki dan perempuan yang masing-masing jenis kelamin memiliki perbedaan peran yang jelas. Sebagai implikasinya, kedua belah pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan masyarakat.³⁵

Fokus pendekatan struktural fungsional dan fungsi reproduksi serta keharmonisan masyarakat membuat pendekatan ini memiliki pandangan yang relatif sinis terhadap aktivitas seksual nonreproduktif dan orientasi seksual yang

³³George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pegetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2011), 26

³⁴<http://muttaqinhabibullah.blogspot.com/2016/04/gender-dalam-konteks-teoristruktural.html?m=1> (diakses 24 Januari 2022)

mempromosikan aktivitas tersebut. Orientasi seksual nonhetero (ketertarikan seksual pada sesama jenis) serta aktivitas seksual nonreproduktif dianggap sebagai penyimpangan. Bagi pendekatan struktural fungsional, homoseksualitas (ketertarikan seksual antara laki-laki dan sesama jenisnya) dan aseksualitas (tidak ada rasa ketertarikan seksual dengan orang lain) tidak boleh dipromosikan secara luas sebab jika kedua hal ini menjadi dominan dalam masyarakat maka keberlangsungan umat manusia akan terancam.³⁶

Pendekatan struktural fungsional memosisikan seks dalam hubungan heteroseksualitas (ketertarikan seksual dengan lawan jenis) sebagai suatu yang bermanfaat karena tanpa hubungan seks masyarakat tidak akan bereproduksi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya norma yang mengatur kehidupan seksual seseorang, misal seperti larangan berselingkuh. Norma tersebut lahir karena perselingkuhan dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, serta mengancam keberlangsungan keluarga sebagai unit sosial.³⁷

Teori struktural fungsional diawali dengan empat fungsi dalam sistem “tindakan” yang disebut skema AGIL.³⁸ Fungsi disini ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan sistem. Empat fungsi ini dibutuhkan untuk menganalisis sistem “tindakan” manusia dalam menjaga paradigm masyarakat. Keempat fungsi itu ialah :

1. *Adaptation* (Penyesuaian Diri)

Sebuah sistem harus sanggup menangani dan menyesuaikan kebutuhan atau keperluan lingkungan yang darurat. Fungsi ini mencakup sistem untuk menanggapi perubahan kondisi eksternal agar mampu

³⁶ Kamla Bhasin, *Memahami Gender*, (Jakarta: Teplok Press, 2002), 31

³⁷ Ibid, 34

³⁸ Georger Ritzer, *Op.cit* 31

beradaptasi dengan kondisi tersebut. Parson menghubungkan fungsi adaptasi dengan sistem perilaku.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Suatu sistem harus mampu mengimplementasikan dan menggapai tujuan utamanya. Seorang individu mempunyai tujuan yang ingin dicapainya setiap tindakan manusia selalu memiliki tujuan tertentu, tetapi tujuan individu kerap berbenturan dengan keinginan lingkungan sosialnya. Sebab individu harus menjadi satu dengan lingkungannya agar tujuan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, tujuan pribadi tidak lagi berarti, namun untuk menggapainya mereka wajib disesuaikan dengan tujuan sistem sosial yang menjalankan tindakan individual.

3. *Integration* (Integrasi)

Suatu sistem wajib menjaga koordinasi internal dengan membangun komunikasi dengan setiap devisi. Kajian dalam fungsi goal attainment mencakup ranah institusi. Konsep integrasi menampilkan posisi dan status dari tiap-tiap faktor yang cocok untuk membentuk solidaritas sosial. Jalinan solidaritas bisa berantakan jika mendahulukan kepentingan individual. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial. Tingkat terjadinya integrasi dibentuk oleh tiap tingkat yang paling bawah harus menyediakan kebutuhan yang sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh tingkat atas, sebaliknya tingkatan di atasnya berperan mengawasi serta mengatur tingkat yang terletak dibawahnya.

4. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Suatu sistem harus mampu menyeimbangkan kondisi sebisa mungkin. Saling melindungi, memelihara pada tingkat individu maupun kelompok agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi *latency* berperan dalam memelihara pola dengan menyiapkan aktor yang mampu mendorong individu mematuhi dan menjalankan nilai norma.

B. Konsep Gender

1. Definisi Gender

Konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme adalah gender. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial budaya laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan itu dikenal sebagai makhluk lemah, cantik, keibuan dan emosional. Sedangkan laki-laki dikenal sebagai makhluk yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Namun sifat tersebut tidak permanen bisa berubah seiring waktu.³⁹

Gender menurut Mansoer Fakhri dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal, dan komponen-komponen yang sangat variatif seperti nilai-nilai budaya, tradisi agama, sosial dan politik.⁴⁰ Fakhri mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultural (*cultural construction*).⁴¹

³⁹ Trisakti Handayani dan Sugiyarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang:UMM Press, 2006), 5

⁴⁰ Menurut Mansour Fakhri, “*Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*”, dalam Skripsi Uswatun Hasanah *Konsep Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakhri dan Relevansinya Dalam Pendidikan Sosial*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013), 4

⁴¹ Masour Fakhri, “Kekerasan Gender Dalam Pembangunan”, dalam Jurnal Ahmad Suedy(ed), *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta:Grasindo,2000), 76

Pada prosesnya, gender telah mendapat pengaruh dari *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrati atau bukap ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh kaum masyarakat melalui proses sosial dan budaya yang panjang serta berkesinambungan (tercipta karena sosial dan budaya). Gender telah terbangun sedekimikian rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, dan pendidikan. Sehingga terbentuklah perbedaan tugas dan peran laki-laki dan perempuan yang kemudian menampilkan aspek feminisme-maskulin, domestik-publik dan reproduksi-produksi.⁴²

Dalam pandangan sosiologis sering terjebak dalam tradisi “*memandang sebelah mata*” terhadap persoalan perempuan karena perspektif biologis yaitu, bahwa maskulinitas ditandai dengan kekuatan, dominasi, dan keberanian. Dengan demikian, penyerangan laki-laki seringkali dianggap sebagai bentuk kewajaran atau hal biasa. Konsep atau kepercayaan ini menimbulkan bias-bias gender berupa : penekanan pada peran gender tradisional, secara langsung maupun tidak langsung mengidentifikasi bahwa perempuan adalah objek seksual laki-laki dan harus menyesuaikan dengan peran tersebut.⁴³ sedikitnya ada 5 bentuk ketidakadilan gender yaitu subordinasi, marginalisasi, beban ganda, stereotip dan kekerasan atau penindasan.

2. Ruang Lingkup Gender

Ada beberapa penjelasan mengenai konsep gender dalam lingkungan sosial⁴⁴ yaitu :

⁴² Eni Zahara, *Gender Dalam Perspektif Neurologi dan Pendidikan*, (Palembang : Rafah Press, 2009), 9

⁴³ Eni Zahara, *Gender Dalam Perspektif Neurologi dan Pendidikan*, (Palembang : Rafah Press, 2009), 13

⁴⁴ Dr. Ikhlasiah Delimonthe,.... 23

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga ialah tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan. Dalam keluarga, anak pertama kali melakukan sosialisasi nilai. Dalam lingkungan keluarga masih banyak ditemukan ketimpangan gender, hal ini dicontohkan oleh seorang ayah yang biasa berada dalam ranah publik dan ibu yang berada dalam ranah domestic. Selain itu, sosialisasi gender yang biasa ditemukan ialah keharusan dari anak-anak perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah, sementara anak laki-laki dibolehkan untuk bermain-main diluar rumah dan tidak diajarkan untuk membantu melakukan pekerjaan dirumah.

b. Lingkungan Pendidikan

Di lingkup pendidikan, biasanya sosialisasi gender yang diterima oleh perempuan adalah mereka selalu diberi mainan berbentuk boneka sedangkan laki-laki diberi mainan berupa mobil-mobilan dan robot. Dalam dunia pendidikan pun, perempuan lebih banyak memiliki berbagai jurusan yang berkaitan dengan rumah tangga seperti tataboga, tatabusana dan tatarias sedangkan anak laki-laki akan lebih ditujukan ke jurusan teknik. Dan hal yang lebih dominan adalah pada keluarga yang memiliki ekonomi lemah pendidikan masih diutamakan untuk anak laki-laki meski anak perempuan mereka dirasa jauh lebih pandai.

c. Lingkungan Kerja

Dalam lingkup pekerjaan, perempuan lebih banyak bekerja dalam bidang pelayanan jasa, bidang administrasi atau perawat. Perempuan masih jarang yang ditempatkan dalam posisi manager atau posisi yang terkait

dengan pengambilan keputusan. Selain itu, masih adanya perbedaan kesempatan dalam dunia kerja dimana laki-laki lebih diprioritaskan dalam berbagai kesempatan.

d. Lingkungan Politik

Kaum perempuan saat ini sudah banyak berhasil menduduki jabatan tinggi dalam dunia perpolitikan. Akan tetapi, proporsional kuantitas dari kaum perempuan yang menduduki jabatan perpolitikan tersebut masih sangat sedikit. Hal ini sebab karena dunia politik yang dirasa tidak pantas dengan perempuan krena penuh dengan dinamika dan juga masih tertanamnya dalam masyarakat tentang tabunya seorang perempuan menjadi pemimpin dalam dunia politik.

3. Keadilan Gender

Keadilan gender termuat dalam lampiran inpres No.9 Tahun 2000, yang menyatakan keadilan gender merupakan proses untuk menjadi adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Gender dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan dan berpengaruh secara dialektik. Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Atau dengan maksud lain, studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial dan keadilan sosial yang tidak dapat terwujud tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat.⁴⁵ Jadi keadilan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada

⁴⁵ Panduan Pelaksanaan Impres No.9 Tahun 2000, *Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*

perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan tersebut.

Ada beberapa indikasi untuk mewujudkan keadilan gender yaitu :

- a. Menerima dan memandang secara wajar perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender.
- b. Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupaya menyeimbangkannya.
- c. Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara baik laki-laki atau perempuan untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan berbagai permasalahan dan mempersiapkan masa depan.
- d. Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang terpisah.
- e. Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi (pemerintahan) yang baik dalam semua institusi masyarakat dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya.
- f. Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender karena pendidikan merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan dan kemampuan mereka.

4. Ketidakadilan Gender

Menurut Mosse, bahwa ketidakadilan gender terutama dialami oleh perempuan sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan laki-laki dan perempuan yang hierarkis,

dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal. Ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan diri sendiri.⁴⁶

Dominasi laki-laki dalam berbagai bidang terutama dibidang pendidikan merupakan ketidakadilan gender. Pada struktur budaya tertentu, berlaku norma sosial dimana perempuan diperankan sebagai kaum yang pantas untuk mengurus anak, suami dan bertanggungjawab atas urusan rumah tangga. Sedangkan laki-laki diperankan sebagai sosok yang berkewajiban mencari nafkah diluar rumah.⁴⁷ Stigma ini pun sering kali diajarkan oleh para guru dalam memberikan bahan ajaran. Padahal soal peran sosial, laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak yang sama untuk memperolehnya selagi karakter yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat dimana ia berada.⁴⁸ Nilai tersebut berupa kesetaraan, keadilan, persamaan derajat dan kebebasan.

Dalam pengertian positif yang ingin dicapai adalah keadilan gender. Keadilan gender adalah proses yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Agar proses yang adil bagi laki-laki dan perempuan terwujud diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat. Oleh sebab itu, keadilan gender tidak terfokus pada perlakuan yang sama, tetapi lebih mementingkan pada kesetaraan sebagai hasilnya. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut saling berkaitan dan berpengaruh satu dengan lainnya.

⁴⁶ Mosse Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), 66

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *ibid*

Sedikitnya ada lima bentuk ketidakadilan gender yaitu subordinasi, marginalisasi, beban ganda, stereotip dan kekerasan atau penindasan. Berikut adalah penjabaran mengenai bentuk-bentuk keadilan dan ketidakadilan gender⁴⁹:

a. Subordinasi

Suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan arti lain sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama dan tinggi dibandingkan jenis kelamin yang lainnya. Misal, laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin dibanding perempuan dengan kata lain perempuan harus tunduk kepada kaum laki-laki. Pemimpin (iman) hanya pantas dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya boleh menjadi yang dipimpin (makmum).

b. Marjinalisasi (Peminggiran)

Suatu proses peminggiran atau menggeserkan kepinggiran. Anggapan bahwa anak perempuan lebih teliti maka mereka diarahkan untuk sekolah guru, perawat, sekretaris dan sejenisnya. Ironisnya masih ada yang menganggap pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan lain yang bersifat maskulin. Perempuan cenderung dimarginalkan, yaitu posisi pinggir. Dalam kegiatan masyarakat perempuan paling tinggi hanya menjadi seksi konsumsi atau penerima tamu saja.

c. Beban Ganda (Double Burden)

Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan disektor publik

⁴⁹Agus Afandi, "*Bentuk-Bentuk Bias Gender*", (Surabaya: Lentera Jurnal of Gender and Children studies, 2019), 3-11

tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. peran ganda yang harus tetap dijalankan baik domain publik atau domestic. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestic dibebankan kepada perempuan, tuntutan ekonomi keluarga selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja dikebun, kepasar mencari nafkah untuk keluarga dan pekerjaan lainnya. Akibat ketidakadilan gender itu, kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada yang dipikul oleh kaum laki-laki. dalam bekerja kaum laki-laki paling aktif rata-rata 8 jam/sehari, sedangkan perempuan bekerja 18 jam/sehari. Pada umumnya beban ini dianggap remeh oleh kaum laki-laki, karena secara ekonomi dinilai kurang berarti.

d. Kekerasan

Bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok orang yang menyebabkan efek negative secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (korban). Karena kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah, karenanya kaum perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (violence) oleh kaum laki-laki. Dalam masyarakat bentuk kekerasan itu mulai dari digoda, dilecehkan, dipukul, diceraikan sampai diperkosa dan eksploitasi seks terhadap perempuan masih tetap tinggi baik didalam maupun luar rumah.